

Judul : DPR Nilai Kemenhub Lamban Wujudkan Keselamatan Transportasi Udara
Tanggal : Jumat, 23 November 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 15

DPR Nilai Kemenhub Lamban Wujudkan Keselamatan Transportasi Udara

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi V, menilai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tidak serius meningkatkan keamanan transportasi udara, termasuk mewujudkan *zero accident*.

Kesimpulan yang disampaikan dalam rapat dengan pendapat Komisi V DPR dengan Kemenhub, Basarnas, Polri, dan KNKT ini terkait lambannya kedua institusi tersebut menindaklanjuti rekomendasi Komisi V DPR ke Kemenhub dan KNKT. Dari 157 rekomendasi yang diberikan, baru sekitar 20 yang ditindaklanjuti.

"Itu kenapa sebenarnya masalahnya. Kalau memang ada yang sulit atau bagaimana, sebaiknya disampaikan, kami ini kan mitra," ujar Ketua Komisi V DPR Fary Djemi di Gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia mengingatkan keselamatan dan keamanan penumpang itu menjadi hal yang paling utama yang harus menjadi perhatian ke depan. Dia memprihatinkan tren jumlah kecelakaan dalam tiga tahun terakhir ini justru meningkat. "Saya harus minta penjelasan

terkait keseluruhan seluruh komponen penerbangan Indonesia yang hadir di sini terkait upaya penerapan *zero accident* ini mau seperti apa?" tandasnya.

Anggota Komisi V DPR Sukur Nababan meminta KNKT harus lebih aktif dan terbuka dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi DPR. KNKT harus bisa melihat pentingnya hasil investigasi dengan menyeluruh, termasuk untuk korban, bukan hanya untuk memberi keuntungan pihak perusahaan transportasi.

"Terkait soal Lion ini juga kan sudah ada lebih dari 20 kasus kecelakaan. Sepertinya belum dengan tegas ditindaklanjuti. Pemerintah harus lebih tegas," ucapnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak Kemenhub untuk mengevaluasi penerapan tarif pelayanan kelas ekonomi pada maskapai penerbangan nasional. Kemenhub juga harus memastikan maskapai memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan.

"Kami, juga RI, mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan keahlian pelatihan kualitas dan kuantitas



(Kiri ke kanan) Kepala Basarnas M Syauqi, Kepala BMKG Dwikorita Kamawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana Banguningsih menyampaikan paparan mereka saat rapat kerja terkait kecelakaan Lion Air JT-610 dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

profesionalisme sumber daya manusia bidang penerbangan," katanya.

Sementara itu, Menteri Per-

hubungan Budi Karya mengatakan saat ini tindak lanjut rekomendasi DPR terkait keselamatan transportasi terus

dilakukan. Saat ini setidaknya ada 40 lebih rekomendasi yang tengah ditindaklanjuti. "Kami terus tindak lanjuti," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa fungsi regulator yang dilakukan oleh Kemenhub sudah cukup dilakukan. Hal sama juga di-

lakukan KNKT. Budi Karya lantas menyebutkan pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada maskapai Lion Air untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki standar operasional prosedur (SOP).

"Audit khusus yang kita lakukan sebagian sudah kita sampaikan kepada KNKT, intinya adalah berkaitan dengan peningkatan SDM dan upaya untuk meningkatkan SOP pada dasarnya itu. Itu payung hak yang kita berikan, kami sudah memberikan rekomendasi kepada Lion Air terkait dua hal tersebut," jelasnya.

Dia lebih jauh memaparkan, *leading sector* ketika terjadi suatu kecelakaan ada pada KNKT seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 357. Dengan demikian, urusan investigasi Lion Air masih diteliti oleh KNKT dan bukan merupakan wewenang Kemenhub.

"Saat ini kita masih menunggu hasil investigasi KNKT dan belum dapat menentukan sanksi terkhusus kepada maskapai yang sedang diinvestigasi," jelasnya.

● **mula akmal**